

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Semangat kekaryaan yang terwujud di dalam bentuk pengakuan terhadap Partai Golongan Karya yang tumbuh ketika pembahasan dan penyusunan Undang-Undang 1945 sedang dilakukan. Namun kedudukannya secara formal belum diatur dengan tegas pada awal kemerdekaan, hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden.

Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden Nomor X, yang disusul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, yang memberi kesempatan mendirikan partai – partai politik dengan ideologi yang beraneka ragam.

Kehidupan politik dalam sistem multi partai tersebut berlangsung sampai tahun 1957 dalam zaman yang dikenal dengan sebutan zaman demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Dalam zaman ini kendali percaturan politik berada ditangan partai – partai politik. Kendati pemilu 1955 telah dilangsungkan namun tidak ada satupun partai politik yang cukup dominan mengendalikan parlemen maupun pemerintahan. Keadaan demikian mendorong setiap berbentuk kabinet koalisi secara silih berganti.

Dalam suasana demikian antara tahun 1950-1957 tidak kurang enam kabinet silih berganti. Setiap kabinet baru melahirkan program baru. Program kabinet lama ada yang diteruskan tetapi lebih banyak yang dibatalkan, karena tidak sesuai dengan program partai politik yang berkuasa. Akibatnya banyak

program yang sedang dalam pelaksanaan menjadi terlantar dan menimbulkan kerugian negara yang tidak sedikit. Pemerintah selalu ragu – ragu untuk melaksanakan programnya karena selalu dihantui oleh seringnya pergantian kabinet dalam waktu relatif singkat. Sejarah telah mencatat bahwa umur kabinet pada zaman demokrasi parlementer tersebut rata – rata kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu dapatlah dimengerti bahwa tidak satupun kabinet tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja.

Sementara itu pemberontakan bersenjata dan tuntutan daerah terhadap Pemerintah Pusat makin meluas, seperti pemberontakan DI-TII di Jawa Barat, Jawa Tengah Aceh, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan serta pemberontakan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi.

Ketidakstabilan politik dan keamanan dan tidak terjaminnya keselamatan rakyat mendorong TNI mengambil tindakan – tindakan yang dianggapnya perlu seperti pemberlakuan undang – undang keadaan bahaya pada tahun 1957.

Dalam usaha pemulihan keamanan, TNI menyadari sepenuhnya bahwa keamanan tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan senjata saja, karena gangguan keamanan itu berlatar belakang sosial politik. Salah satu langkah yang diambil oleh TNI adalah penggalangan golongan – golongan fungsional dengan maksud tersebut dapat diajak turut dalam usaha pemulihan keamanan.

Ajakan TNI kepada golongan – golongan fungsional untuk bekerja sama mendapat sambutan positif dari golongan fungsional yang tidak berafiliasi kepada suatu partai politik. Mereka merasa bahwa perjuangan yang tepat untuk melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Puncak pertentangan partai – partai politik dalam masa demokrasi parlementer adalah kegagalan Konstituante dalam menetapkan Dasar Negara

1959, pertentangan tersebut berpusat pada adanya partai – partai politik yang dengan gigih mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, tetapi ada pula partai – partai politik yang dengan gigih pula menghendaki dan memperjuangkan Syari'at Islam sebagai dasar negara.

Untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kekacauan dan kehancuran, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 yang pembukaanya memuat Pancasila yang resmi dan asli sebagai dasar negara kita.

Dengan berlakunya UUD 1945, maka mulailah dirintis penyederhanaan partai politik. Pada permulaan tahun 1961 hanya diakui 10 partai politik, tetapi walaupun jumlah partai – partai politik telah berkurang ternyata tidak mengurangi pertentangan ideologi didalam masyarakat malahan pertentangan itu semakin meruncing. Hal ini disebabkan adanya format politik Nasakom (nasionalis, agama, komunis) yang di gagas oleh Soekarno, PKI yang menjadi tulang punggung struktur politik Nasakom itu menuntut agar semua lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan, termasuk golongan fungsional dinasakomkan. PKI sebagai tulang punggung utama politik nasakom menjadi semakin dominan dalam percaturan politik nasional dan untuk menghadapi ancaman PKI maka didirikan Soksi, Kosgoro dan MKGR.

Sebagai perlawanan terhadap tekanan – tekanan PKI dan dalam rangka UUD 1945, maka golongan – golongan fungsional yang tidak berafiliasi pada partai politik dan dengan dukungan TNI berjuang keras untuk memformalkan kehadiran didal masyarakat. Melalui perjuangan yang ulet dan terus – menerus dari golongan fungsional, berdasarkan peraturan presiden nomor 12 tahun 1959, diangkatlah 200 (dua ratus) orang wakil – wakil Golongan Kerja di MPRS

Kemudian dengan Kepres Nomor 193 tahun 1964 diakuilah wakil – wakil golongan karya di Front Nasional.

Dengan adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional, maka atas dorongan TNI dibentuklah Sekretaris Bersama Golongan Karya ( SEKBER GOLKAR) pada tanggal 20 Oktober 1964 dan tanggal ini merupakan hari lahirnya Golkar.

Setelah meletus peristiwa G.30.S/PKI maka TNI, Sekber Golkar, Pemuda, mahasiswa dan rakyat yang Pancasila bangkit dengan serentak menumpas gerakan pengkhianatan G.30.S/PKI tersebut dan dalam waktu singkat gerakan tersebut dapat ditumpas habis.

Pada awal pertumbuhan Partai Golongan Karya, serber Partai ini beranggotakan 61 organisasi fungsional, kemudian bertambah hingga mencapai 291 organisasi fungsional, karena golongan-golongan fungsional lainya sudah menyadari bahwa serber Golkar juga berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta tujuan dan haluannya adalah Demokrasi Pancasila untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Sementara itu proses kristalisasi dalam tubuh Sekber Golkar berjalan terus, dengan didirikannya Parmusi pada tahun 1968 maka sejumlah organisasi melepaskan diri dari Sekber Golkar. Disamping itu dibentuklah kelompok organisasi (Kino-Kino) sebagai pengelompokkan dari organisas-organisasi yang bergabung dalam Sekber Golkar. Proses kristalisasi ini berlanjut lagi dengan keluarnya peraturan menteri Nomor 12 tahun 1969.

Dalam keadaan yang terkristalisasi demikian, Sekber Golkar memasuki Pemilu 1971 ternyata rakyat memberikan kepercayaan kepada Sekber Golkar, dimana Sekber Golkar meraih 62,79 % suara Pemilih. Setelah golkar meraih

kemenangan dalam pemilu 1971 maka sesuai dengan ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi GOLKAR.

Dalam memasuki Orde Baru maka untuk memantapkan dirinya diadakanlah Musyawarah Kerja Nasional I (MUKERNAS I) Sekber Golkar dari tanggal 9 sampai 11 Desember 1965. pada waktu itu Mukernas berhasil menyusun program perjuangan disegala bidang dalam rangka usaha menegakkan Orde Baru.

Dalam masa awal Orde Baru, Sekber Golkar tumbuh dan berkembang bersama - sama dengan eksponen - eksponen orde baru lainnya serta memelopori pembaruan kehidupan politik berdasarkan konsepsi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen serta melaksanakan Pembangunan Nasional disegala bidang sebagai upaya pengisian cita - cita proklamasi.

Selama perjalanannya Golkar telah memposisikan diri sebagai kekuatan sosial politik pendukung Orde Baru. Hal ini tercermin dari setiap pelaksanaan Munas Golkar senantiasa menghasilkan keputusan yang memberikan dukungan terhadap program - program pemerintah. Dengan kata lain program organisasi selalu disinkronkan dengan program pemerintah dan mendapat dukungan serta legitimasi dari lembaga legislatif yang dikuasai oleh Golkar.

Ada empat hal utama yang menjadi ciri golkar dimasa orde baru. Pertama, dikenal dengan istilah *Sistem Tiga Jalur* ( A= ABRI, B=Birokrasi, G=Golkar). Kedua, dominannya peranan lembaga Dewan Pembina. Ketiga, pengambilan keputusan selalu dari atas (top down) dan Keempat sangat menghindari

pemungutan suara (voting) untuk menentukan pimpinan organisasi disemua tingkatan atau dari Ketua Umum DPP sampai pada tingkat kepeguruan terbawah.

Fenomena umum yang tergambar dari kehidupan kekuatan sosial politik (Orde Baru, parpol dan Golkar) terkesan terlalu kaku, struktural, institusional dan formalistik. Seluruh kekuatan sosial politik baik secara diam – diam maupun terang – terangan diarahkan untuk memberikan dukungan berupa legitimasi yang kuat kepada pemerintahan Orde Baru<sup>1</sup>.

Kondisi tersebut tercipta akibat berkembangnya sistem politik yang menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama yang dikenal dengan nama pembangunanisme (developmentalisme). Hal ini diterima luas oleh sebagian besar elit dan massa. Salah satu syarat pembangunan ekonomi itu ialah adanya stabilitas politik dengan jalan mengurangi partisipasi politik dan membatasi kebebasan politik.

Setelah runtuhnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun tersebut tentu saja mengimbas kepada partai politik Golkar yang selama ini diasumsikan menjadi pendukung utama dan setia rezim tersebut. Hal ini secara kasat mata terlihat pada masyarakat memandang negatif terhadap partai ini, bahkan didalam tubuh Golkar pada awal – awal reformasi juga masih diperparah dengan konflik internal yang terjadi didalam kepeguruan partai ini, serta keterlepasan Golkar dari TNI dan Birokrasi pasca reformasi berakibat Golkar tidak punya pilihan lain kecuali harus membangun kembali kelembagaannya.

<sup>1</sup> PENGETAHUAN TENTANG KE-GOLKARAN-AN “ Materi Perkaderan Partai Golkar Tingkat Kabupaten/Kota, Hal 6-13. DPP Partai Golongan Karya, Jakarta.

Partai politik adalah organisasi yang bagaimanapun juga memiliki aturan yang formal dan juga tujuan yang formal, namun proses dimana mereka menjadi terlembagakan tidaklah identik dengan bagaimana perkembangan partai yaitu dalam terminologi partai yang bersifat organisasional semata.

Sementara dengan mempertimbangkan model organisasi partai yang membagi tipe partai ke dalam partai elit, partai massa dan partai kader, maka akan mengikis kelemahan pendekatan kepartaian selama ini yang cenderung melihat partai sebagai institusi yang homogen plus kompak, dan hanya memiliki satu kepentingan dan rasionalitas, sehingga diharapkan temuan terhadap persoalan-persoalan pengorganisasian kepartaian akan dapat lebih menemukan ketajamannya.

Menurut Katz dan Mair yang membagi wajah partai ke dalam tiga konteks, yaitu: pertama, Ranah Party on the Ground, kedua, Party in Central Office (Partai pada tingkat pusat), dan yang ketiga Party in Publik Office (partai yang berada dalam pemerintahan), yang diwakili oleh anggota-anggotanya yang mendapat kesempatan menduduki jabatan-jabatan publik. Dalam fokus penelitian ini adalah pada Party On the Ground sebagai obyek penelitian karena partai pada level ini berhadapan langsung dengan massa pada level grass-roots, yang akan berhubungan dengan bagaimana mengajak orang untuk memberikan suara dalam sebuah pemilu.pada level ini partai menjadi ujung tombak cerminan partai politik secara total atau keseluruhan. Performance partai pada tingkat lokal, diasumsikan akan berpengaruh secara signifikan terhadap performance partai secara nasional.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan partai politik di Indonesia adalah melakukan penaksiran (*assessment*) terhadap tingkat pelembagaan yang telah berlangsung dalam suatu partai politik.

Pendekatan insitusionalisasi partai politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Randall dan Svasand yang melihat institusionalisasi partai terbagi dalam empat aspek, yang terbagi dalam dimensi internal dan eksternal. Dalam analisis tentang institusionalisasi partai politik di Indonesia, penelitian ini hanya akan melihat dimensi internal dari teorisasi Randall dan Svasand, yakni aspek *systemness (Derajat Kesisteman)* dan *value infusion*.

Dimensi internal ini sangat penting, karena sebuah partai akan mampu berkompetisi dalam sebuah pemilu, maupun melaksanakan berbagai agenda dan fungsi yang dibebankan kepadanya, juga melakukan institusionalisasi secara eksternal jika secara internal partai telah terkonsolidasi dan terlembaga. Namun jika secara internal saja partai telah bermasalah, maka akan kecil harapannya partai dapat berkembang menjadi sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat.

Dalam usaha mencapai cita –citanya partai Golkar melaksanakan kebijakan ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Sebagai partai politik partai Golkar menjalankan fungsi – fungsi politik secara baik dan transparan, yaitu sebagai wadah penyalur kepentingan rakyat, alat pelatihan kader politik dan kader bangsa, sarana pendidikan politik, partisipasi politik rakyat serta komunikasi politik.

Sifat partai Golkar yang terbuka dapat dibuktikan dengan multi etnisnya anggota partai dimana setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota



partai Golkar tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan serta wujudnya dapat dilihat pada kebijakan sikap partai Golkar dalam memelihara kerukunan hidup beragama dan persaudaraan yang hangat diantara sesama warga negara yang berlainan latar belakang budaya, suku atau rasnya.

Oleh karena itu partai golkar akan terus mendorong terciptanya partisipasi politik yang kuat dan mengakar ditengah – tengah masyarakat, sehingga didalam diri kader dan anggota Golkar akan tumbuh rasa memiliki serta akan memperkuat posisi partai di daerah, dengan ini Pimpinan Partai di Daerah dapat mengambil inisiatif tanpa menunggu instruksi dari pusat, karena setiap kebijakan pusat belum tentu cocok dengan kondisi di daerah yang sangat beraneka ragam.

Berdirinya Partai Golkar Propinsi DIY tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pada level pusat. Meskipun dalam paradigma terbarunya Golkar sekarang tanpa malu-malu lagi menyebut dirinya sebagai Partai, yang demokratis, moderat, yang mengakar dan terpisah dari pemerintah, namun sebagaimana secara formal ditulis dalam AD/ART-nya.

Keberadaan partai golkar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada pasca orde baru secara umum mirip dengan kondisi partai ini di wilayah lain, Golkar menghadapi perombakan format politik yang menyebabkan hilangnya hak – hak istimewa penting yang menjadi pilar kemenangannya selama pemilu orba. Dengan lepasnya hak – hak istimewanya, golkar mengalami penurunan kualitas perolehan suaranya dalam jumlah yang besar.

Namun demikian secara kualitas kekuatan Golkar tetap harus diperhitungkan oleh partai lain karena ternyata hilangnya hak – hak istimewa ini tidak serta merta membuat Golkar menjadi partai yang lemah. Golkar tetap

mempunyai pengaruh besar kedalam menentukan arah dinamika perpolitikan di Yogyakarta.

Penelitian ini mengambil Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, mengingat Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang predikat istimewanya di dapatkan karena klaim atas iklim intelektualitasnya yang cukup tinggi sehingga banyak disebut sebagai Kota Pelajar<sup>2</sup>. Hal ini tidak lepas dari banyaknya lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang ada di Provinsi DIY dan Kota Yogyakarta sendiri, Sehingga Yogyakarta mempunyai tingkat Sumber Daya Manusia yang cukup tinggi untuk mempengaruhi sebuah iklim politik. Asumsi inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk memilih provinsi DIY sebagai lokasi penelitian.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

“ Bagaimana Derajat Kesisteman (Systemness) di DPD Partai Golkar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ”

## **C. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar teori guna menganalisis suatu permasalahan untuk dijadikan acuan berpikir berupa konsep dan teori untuk mempermudah dan juga memahami tentang konsep – konsep yang digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan, kerangka dasar dalam penulisan ini antara lain:

---

2 Tunjung Sulaksono, *Konflik Pusat-Daerah dalam Rekrutmen Elit Lokal: Studi Kasus Pemilihan Gubernur DIY 1998*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta, 2000.

## 1. Partai Politik

Berdasarkan aspek kesejarahannya, sejarah awal lahirnya partai politik bisa dipisah menjadi dua karakteristik umum, yaitu partai politik yang lahir dalam parlemen dan partai politik yang lahir ekstraparlemen.

Di Inggris dan Perancis, kegiatan politik boleh dikatakan terinspirasi oleh model pemilihan pemimpin yang cenderung aristokratis, karena sistem pemerintahannya yang menganut paham monarki, hal itu dilakukan dari dalam parlemen ke ekstraparlemen. Interaksi antara para petinggi kerajaan (sebagai politisi parlementer) dengan panitia – panitia pemilihan diluar parlemen pun berjalan sangat harmonis sehingga mereka saling bekerjasama menggalang dan memperjuangkan kepentingan masing – masing.

Lahirnya partai politik yang berembrio dari dalam parlemen seperti disebutkan diatas lebih bersifat *patronage party* (partai perlindungan) serta cenderung tidak mempunyai disiplin administrasi yang rumit dan ketat.

Selanjutnya, sejarah perjalanan partai politik di barat mengalami perubahan sedikit demi sedikit, partai politik mulai dibentuk bukan atas permainan stereotipe para bangsawan, melainkan muncul dari luar parlemen. Partai – partai tersebut bersandar pada suatu pandangan ideologis tertentu seperti sosialisme, Kristen demokrat, dan sebagainya. Berbeda dengan karakter pertama, partai semacam ini mempunyai aturan kuat dan pemimpinnya lebih terpusat.<sup>3</sup>

Setelah wacana perluasan hak – hak politik bagi rakyat semakin meningkat dengan pesat itulah, partai politik seakan – akan telah lahir

---

<sup>3</sup> Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi : *Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia*, Pustaka Pelajar Offset, 2004, Bab II, Hal. 24

dengan sendirinya secara spontan. Apalagi, keterlibatan rakyat dalam proses politik yang ada waktu itu sudah dianggap sebagai wujud interaksi antara pemerintah dan rakyat diperlukan kendaraan politik yang diasumsikan mampu menjaga simbiosis antara keduanya dan kendaraan politik tersebut pada akhirnya bernama partai politik.

## 1.1 Pengertian Partai Politik

Mark N.Hagopian

Partai Politik adalah “Suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan public dalam kerangka prinsip – prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan”.<sup>4</sup> Dari definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa;

- **Partai** suatu wadah sebagai fasilitas yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membentuk suatu organisasi guna mensinyalir kebijaksanaan masyarakat sebagai kepentingan ideologi.
- **Politik** ilmu tentang karakter kebijaksanaan publik yang mengkaji perinsip – perinsip ideologis secara langsung atau partisipasi kekuasaan rakyat dalam memperoleh suatu kebijakan. Fenomena ini masih relatif baru , studi ini menyangkut tentang tingkah laku laku voters.

Richard W. Scott

Partai politik adalah organisasi, yang bagaimanapun memiliki aturan formal dan tujuan yang juga formal. Namun proses di mana mereka menjadi terlembagakan tidaklah identik dengan dengan bagaimana perkembangan partai dalam terminologi partai yang bersifat organisasional semata-mata.

## **1.2 Fungsi Partai Politik**

Dalam sebuah sistem Politik, Partai Politik mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- **Sosialisasi Politik**

Proses pembentukan sikap & orientasi pol anggota masy. Melalui proses sosialisasi pol ini masy. memperoleh sikap & orientasi thd kehidupan politik yg berlangsung.

- **Rekrutmen Politik**

Seleksi & pemilihan atau seleksi & pengangkatan seseorang atau sekelompok orang utk melaksanakan sejumlah peran dlm sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

- **Partisipasi Politik**

Kegiatan WN biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menetapkan

- **Komunikasi Politik**

Proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

- **Pengendali Konflik**

Berusaha mengendalikan konflik yang ada dengan jalan berdialog dan berkompromi

- **Kontrol Politik**

Kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan kontrol politik yaitu meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaannya sesuai dengan tolok ukur yang disepakati bersama.

### **1.3 Fungsi Partai Politik GOLKAR**

Dari fenomena diatas dapat ditarik benang merah bahwa Partai GOLKAR Berperan aktif untuk :

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

- c. Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan mempersiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **1.4 Kategori Partai Politik berdasarkan Fungsi**

Berkaitan dengan pembahasan aktualisasi partai politik, disini perlu juga diuraikan secara lebih jelas tentang jenis – jenis partai politik yang ada di Indonesia dan pengaruhnya terhadap efektivitas fungsi yang di jalankannya.

Sebab dengan melihat jenis – jenis partai politik ini kita dapat mengidentifikasi kecenderungan kinerja yang nantinya akan ditampilkan oleh masing – masing partai politik yang ada di Indonesia.

##### **1. Partai Kader**

Jenis partai ini berkembang sebagai akibat hak pilih belum diberikan kepada masyarakat luas, partai ini kebanyakan anggotanya dari kelas menengah keatas, dan tidak memerlukan organisasi besar untuk memobilisasi massa. Tingkat organisasi dan ideologinya rendah, sebab aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Karena penekanan partai kader sesungguhnya adalah terletak pada penguatan yang cukup tinggi pada level pengurusannya untuk kepentingan partai.

## 2. Partai Kepentingan

Partai ini merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini sering ditemui dalam sistem banyak partai atau sistem dua partai berkompetisi.

## 3. Partai Doktriner

Jenis partai ini memiliki sejumlah program dan kegiatan secara kongkrit sebagai penjabaran ideologi, ideologi yang dimaksud disini adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongrit dan sistematis dalam bentuk program – program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Ciri – cirinya partai ini pimpinannya tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai yang sudah dirumuskan secara kongrit dan terorganisasi secara ketat.

## 4. Partai Massa

Berkembangnya partai ini karena adanya perluasan hak pilih rakyat. Parpol ini dibentuk diluar parlemen (*ektraparlemen*). orientasinya pada basis pendukung seperti buruh, petani, pekerja, dan massa yang lainnya yang bertujuan pendidikan politik dan kemenangan pemilu.

## 5. Partai Proto

Partai proto merupakan karakter dasar dari tipe awal parpol yang biasanya ada dalam lingkungan parlemen atau intraparlemen. Basis pendukungnya adalah kelas menengah kelas. Ciri dari partai ini



belum sepenuhnya termasuk dalam ciri parpol modern, karena hal yang paling menonjol dalam partai ini adalah perbedaan kelompok anggota dan kelompok non anggota dan faksi yang masih menonjol. Elite partai biasanya diisi oleh orang-orang kelas bangsawan.

#### 6. Partai Catch-all

Jenis partai ini merupakan gabungan antara jenis partai kader dan partai massa, mereka berusaha menampung kelompok kepentingan dan penekan dan ideologinya tidak terlalu kaku, seperti halnya partai-partai pemenang pada pemilu 1999 masuk dalam jenis ini. Partai jenis ini tidak mengandalkan ideologi akan tetapi penguatan pada kuantitas basis massa meskipun demikian mereka juga melakukan kaderisasi pada internal elite pengurusnya. Sehingga konsekuensinya adalah proses pendidikan politik terabaikan.

#### 7. Partai Diktatorial.

Partai jenis ini merupakan sub-tipe dari partai massa akan tetapi ideologinya bersifat kaku dan radikal. Cirinya terletak Pada kepemimpinan partai terdapat kontrol ketat, sehingga anggota partai dituntut untuk mengabdikan secara penuh. Tidak hanya ketat dalam hal kepemimpinan akan tetapi dalam hal rekrutmen dan kaderisasi anggotanya sangat dalam konteks konsistensi ideologi yang dianut.

## **2. Institusional Partai Politik**

Pelembagaan atau institusionalisasi berarti memiliki ketangguhan dan daya tahan, sanggup menghadapi berbagai krisis, serta menyuguhkan pemerintahan alternatif yang dapat dipercaya rakyat.

Pengembangan kelembagaan partai politik di sini didefinisikan sebagai proses yang dilalui oleh partai agar terorganisasi secara lebih baik, mempraktikkan nilai-nilai demokrasi, membuat aturan dan prosedur sehingga memungkinkan partai-partai politik mampu bersaing secara efektif dan lebih berhasil dalam pemilu, serta menerapkan pilihan-pilihan kebijakan mereka. Jika berhasil, pengembangan kelembagaan bisa berakibat partai tersebut duduk dalam pemerintahan dan memperlihatkan kinerja yang baik saat memerintah. Kemungkinan lain, partai-partai dapat memperlihatkan kinerja yang baik sebagai oposisi yang memiliki makna penting (sama pentingnya dengan berada dalam pemerintahan).

Oleh karena itu, partai yang melembaga (institutionalized) memiliki kemampuan dalam menanggapi dan bertanggungjawab terhadap tuntutan dan kepentingan para anggota, dan para pemilih yang lebih luas.

Untuk melembagakan dirinya, partai politik karenanya perlu berkembang dalam suatu proses yang secara seksama mengikuti sentimen publik dan yang sejalan dengan perkembangan sosial. Upaya tersebut memerlukan perpaduan yang lentur antara gagasan yang dijadikan pedoman, kepentingan dasar, praktik demokrasi dan pembuatan keputusan yang rasional.

Sedikitnya terdapat lima bidang yang berkaitan dengan organisasi

internal partai politik yang dapat dijadikan kriteria semacam itu: *ketangguhan organisasi, demokrasi internal, identitas politik, keutuhan partai dan kapasitas berkampanye*. Agar lebih jelas, kelima unsur tersebut perlu dibedakan, kendati semuanya berkaitan dalam praktik dan bahkan mungkin sampai tingkat tertentu bertumpang tindih satu sama lain. Setiap bidang dianggap meningkatkan daya tanggap partai tertentu akan berbagai tuntutan dan kepentingan serta menjadikan tanggapan yang diberikan menjadi lebih efektif. Jika semua bidang tersebut dikembangkan, maka hal ini akan meningkatkan peluang politik partai pada saat pemilu tiba.

### **3. Derajat Kesisteman (Systemness)**

Kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik.

Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan organisasi sebagai suatu kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu (e) apakah

dengan klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) atau menurut konstitusi partai (AD/ART).

Titik terlemah partai politik di Indonesia adalah belum ada kesisteman dalam suatu partai. Kebanyakan partai politik, termasuk partai politik yang telah memenuhi ketentuan electoral threshold, memiliki derajat kesisteman yang rendah karena keempat indikator itu, tetapi terutama karena peran pemimpin partai lebih dominan daripada kedaulatan anggota (b) dan kepentingan faksi, kelompok, dan golongan lebih dominan daripada kepentingan partai sebagai organisasi. Pemimpin yang dominan dalam partai politik tidaklah dengan sendirinya buruk. Peran pemimpin dominan akan menimbulkan akibat buruk bila sang pemimpin menggunakan kharismanya untuk melanggengkan dominasinya, sedangkan peran dominan pemimpin akan menimbulkan akibat positif bila sang pemimpin menggunakan kharismanya memoangun kesisteman dalam partai.

Faksi atau pengelompokan dalam partai juga tidak dengan sendirinya buruk. Bila pengelompokan dalam partai terbentuk atas dasar primordial, maka pengelompokan akan merusak solidaritas partai karena akan menimbulkan konflik zero-sum (yang menang mendapatkan semuanya, yang kalah tidak mendapatkan apa-apa). Tetapi bila pengelompokan berdasar perbedaan orientasi (pola dan arah) kebijakan, maka pengelompokan itu justru akan mendinamiskan partai karena konflik yang timbul justru non zero-sum (menang-menang alias semua kelompok menang).

Untuk membangun kesisteman dalam setiap partai politik dapat ditempuh dengan "pasal" (undang-undang) tetapi dapat pula ditempuh dengan "pasar" (kompetisi dan penilaian warga masyarakat). Dalam rangka membangun kesisteman ini, pada UU Partai Politik perlu dimuat ketentuan yang mengharuskan setiap partai politik merumuskan AD/ART secara komprehensif dan rinci-detail, dan ketentuan yang memuat jenis keputusan perihal apa saja yang harus diputuskan melalui rapat anggota. Setidaknya tiga isu harus diputuskan melalui mekanisme Rapat Anggota sesuai tingkatannya, yaitu (a) penentuan pengurus partai politik pada semua tingkatan, (b) penentuan calon partai politik untuk jabatan legislatif (DPR dan DPRD), eksekutif (Presiden/wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan jabatan publik lainnya, dan (c) penentuan kebijakan partai politik mengenai peraturan perundang-undangan, dan kebijakan publik pada umumnya.

Agar hal ini bisa terwujud, maka diperlukan suatu sistem insentif internal yang mencukupi untuk mengembangkan *selective incentives* bagi mereka yang ingin berkecimpung dalam kepemimpinan partai dan *collective incentives* untuk memperkuat loyalitas terhadap partai. Untuk mengukur tingkat institusionalisasi partai politik, maka Panebianco menunjuk dua kriteria, yakni: *the degree of autonomy vis a vis its environment* dan *the degree of internal systemness* atau *interdependence of different sector*. Sekali lagi, dia menunjukkan bahwa *autonomy* dan *systemness* adalah dua hal yang dalam praktiknya akan saling berkaitan.

Proses kelembagaan ini mengandung dua aspek, pertama, aspek internal-eksternal, kedua, aspek structural-Attitudinal. Kemudian jika kedua aspek ini dipersilangkan maka akan tampak terdapat table empat sel yaitu Systemness, Decision Autonomi, Value Infusion, Reification.

Aspek internal mengacu pada perkembangan di dalam tubuh partai itu sendiri, sementara aspek eksternal berkaitan dengan relasi partai dengan masyarakat di mana dia berada, termasuk dengan lembaga lain. Masing-masing aspek tersebut akan memiliki komponen struktural dan attitudinal, sehingga akan tercipta matriks sebagaimana yang ada di bawah ini :

**Tabel 1.1**

**Matriks Insitusionalisasi Partai Politik**  
**Versi Randall dan Svasand**

	<b>Internal</b>	<b>Eksternal</b>
<b>Struktural</b>	Systemness	Decisional Autonomy
<b>Attitudinal</b>	Value Infusion	Reification

Sumber: Vicky Randall dan Lars Svasand, *Party Institutionalization in New Democracies*, Party Politics Vol. 8 No. 1. Tahun 2002 hal.13.

Dari penyilangan kedua dimensi tersebut diketahui bahwa:

1. Kesisteman (Systemness)

Yang dimaksud dengan Systemness atau kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik derajat kesisteman sebuah partai politik dapat dilihat dari:

- a. Asal-usul partai, apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah.

- b. Sumber pendanaan; Apakah partai sudah mendapatkan sumber dana yang tetap.
- c. Siapa yang lebih berpengaruh antara pemimpin dengan partai politik
- d. Siapa yang lebih menentukan antara faksi-faksi atau partai secara keseluruhan,
- e. Apakah dengan klientilime (pertukaran dengan pemberian materi) ataukah berdasar konstitusi partai.

## 2. Value Infusion

Value infusion berkaitan dengan identitas sebuah partai politik berdasarkan platform partai, basis social pendukung, dan identifikasi anggota terhadap pola arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut. Jadi Value infusion sebuah partai politik terkait dengan:

- a. Hubungan parpol dengan popular basis atau kelompok tertentu
- b. Pengaruh klientelisme dalam organisasi berupa kecenderungan sifat relasi yang instrumentalis atau ideologis.

Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas. Partai buruh sesuai dengan namanya jelas memiliki basis sosial pendukung yang jelas buruh karena pola dan arah perjuangan partai itu memperhatikan kepentingan buruh, dan Partai Republik di Amerika Serikat memiliki basis sosial pendukung yang jelas yaitu kulit putih menengah ke atas.

Enam partai politik peserta pemilu yang 1999 yang berhasil memenuhi ketentuan electoral threshold, memang sudah memiliki ciri ideologi yang dikenal masyarakat, seperti nasionalisme/kebangsaan untuk PDIP dan Partai Golkar, Islam untuk PPP, NU untuk PKB, dan Muhammadiyah untuk PAN. Akan tetapi pola dan arah program kebijakan publik yang diperjuangkannya belum jelas sehingga perbedaan diantara partai politik tersebut juga tidak jelas. Karena itu, masih sukar mengkategorikan basis social pendukung setiap partai politik di Indonesia. jadi dengan value infusion yang jelas, partai politik akan memiliki identitas dan arah perjuangan yang jelas.

### 3. Decisional Autonomy

Decisional Autonomy adalah derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkait dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar), dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat). Untuk lebih menjelaskan Decisional Autonomy ada tiga poin untuk melihatnya dengan cara:

a. Apakah partai tergantung dengan actor diluar partai atau sifat hubungan kedua bersifat saling menguntungkan.

b. Keputusan partai apakah ditentukan dari actor atau pihak diluar

partai ataukah berupa jaringan yang memberi dukungan penuh



Pola hubungan suatu partai dengan aktor di luar partai dapat berupa: (a) hubungan ketergantungan kepada aktor luar, (b) hubungan itu bersifat saling tergantung (*interdependen*), dan (c) hubungan itu berupa jaringan (*linkage*) yang memberi dukungan kepada partai.

Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi otonomi partai bila keputusan partai politik itu tidak didikte pihak luar tetapi diputuskan sendiri dengan atau tanpa konsultasi dengan aktor luar yang menjadi mitra atau jaringan pendukung partai itu. Suatu partai akan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan bila dana untuk membiayai kegiatan partai berasal dari iuran anggota, kontribusi pengurus, dan aktivis di luar iuran.

#### 4. Reification

Yang merujuk pada sebuah kondisi di mana eksistensi partai telah mapan dalam imajinasi masyarakat luas. Artinya, masyarakat merasa bahwa keberadaan partai menjadi sesuatu yang tidak sekedar nyata, namun menyadari bahwa kehadirannya menjadi elemen penting dari sebuah proses demokratisasi. Dengan kata lain reification adalah tingkat pengetahuan publik terhadap sebuah partai politik. Bila keberadaan partai tertentu telah tertanam pada imajinasi masyarakat maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasinya maupun sikap dan aspirasinya dengan keberadaan partai politik tersebut.

## **D. Definisi Konseptional**

Definisi konseptional adalah usaha untuk menjelaskan mengenai pembahasan berisi definisi dari konsep atau variable yang merupakan simpulan deduktif dari teori-teori yang digunakan dalam kerangka dasar teori. Adapun definisi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik derajat kesisteman sebuah partai politik dapat dilihat dari:

### **Derajat Kesisteman**

- a. Asal-usul partai, apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah.
- b. Sumber pendanaan; Apakah partai sudah mendapatkan sumber dana yang tetap.
- c. Siapa yang lebih berpengaruh antara pemimpin dengan partai politik.
- d. Siapa yang lebih menentukan antara faksi-faksi atau partai secara keseluruhan.
- e. Apakah dengan klientilime (pertukaran dengan pemberian materi) ataukah berdasar konstitusi partai.

AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bila partai politik melaksanakan

fungsinya semata-mata menurut AD/ART yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci itu.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah berisi operasionalisasi variabel sampai indikator yang merupakan salah satu unsur sebagai petunjuk pelaksanaan mengukur variable. Definisi Operasional yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dari:

- a. Asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah.

##### ***Ukurannya:***

Dilihat sejarah perkembangan berdirinya partai Golkar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan proses bagaimana partai golkar di bentuk di DIY, dimana pembentukan partai yang lebih mendominasi apakah dari level pusat atau daerah.

- b. Sumber pendanaan; Apakah partai sudah mendapatkan sumber dana yang tetap.

##### ***Ukurannya :***

Dapat dilihat dari bagaimana DPD Golkar DIY memperoleh sumber dana. Apakah berasal dari iuran anggota, iuran sukarela, sumbangan perorangan; sumbangan badan atau lembaga; usaha-usaha lain yang sah; atau bantuan dari sumbangan pemerintah daerah .

- c. Siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin yang disegani atau pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang ditetapkan oleh organisasi yang merupakan suatu kesatuan didalam tubuh partai tersebut.

***Ukurannya:***

Disini kita dapat melihat bagaimana peranan pemimpin (Ketua) DPD DIY mengambil sebuah keputusan, dan bagaimana sistem mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan oleh organisasi serta proses pemilihan pimpinan partai di DPD Golkar DIY.

- d. Siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi-faksi dalam partai atukah partai secara keseluruhan.

***Ukurannya:***

Disini kita dapat melihat apakah didalam internal DPD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi faksi – faksi (pengelompokan) dukungan yang bersifat fanatisme personal.

- e. Apakah ada pertukaran dukungan dan pemberian materi (klientelisme) dalam partai.

***Ukurannya:***

Disini kita dapat melihat sejauh mana pemimpin partai DPD Derah Istimewa Yogyakarta memasang orang-orangnya pada struktur DPP (level pusat).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Di dalam upaya memecahkan masalah diperlukan metode tertentu. Menurut Winarno Surachman metode adalah suatu cara yang paling utama dipergunakan untuk mencapai tujuan. (Winarno Surachmad;1973;121)

**Prof.Dr.H.Noeng Muhadjir** mengemukakan bahwa Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil, dan pengambilannya cenderung memilih hal yang dimaksud daripada acak. Penelitian kualitatif lebih mengarah ke penelitian proses daripada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus.<sup>5</sup>

Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem, pada peristiwa sekarang. Dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara faktual dan sistematis mengenai data, fakta, dan sifat serta hubungan yang diteliti.

---

<sup>5</sup> Prof.Dr.H.Noeng Muhadjir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (edisi IV), Rake Sarasih, Yogyakarta, 2000, hal. 42

## **2. Unit Analisa Data**

Unit analisa data dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Propinsi DIY. Karena data dan informasi yang tersedia terdapat di kantor DPD Partai Golkar Propinsi DIY.

## **3. Jenis Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data dan informasi yang diperoleh melalui keterangan dari pihak-pihak yang kompeten dan berpengaruh terhadap masalah yang ada dalam penelitian ini serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pihak-pihak yang berkompeten ini adalah pihak atau individu yang mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi didalam DPD Partai Golkar Propinsi DIY.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai catatan, buku-buku, artikel-artikel ilmiah, koran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dan fakta dalam penulisan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan ini melalui berbagai cara dibawah ini:

a. Interview

Interview adalah teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dan bertanya langsung kepada pengurus DPD Partai Golkar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peranan pemimpin yang dominan akan menimbulkan akibat buruk apabila si pemimpin menggunakan kharismanya untuk melanggengkan dominasinya, disisi lain peranan dominan pemimpin akan menimbulkan akibat positif apabila si pemimpin menggunakan kharismanya membangun kesisteman dalam partai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi mengenai hal-hal atau variable dalam penulisan penelitian ini melalui berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.

c. Metode sampling (jika diperlukan)

Metode sampling adalah metode dengan memberikan kuesioner kepada suatu obyek tertentu. Akan tetapi dalam penulisan penelitian ini penggunaan metode sampling hanya sebagai alternatif cadangan untuk mendapatkan data itupun terbatas dalam jenis purposive sampling, yaitu metode dengan cara membagikan kuesioner kepada beberapa pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan tema penelitian.

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif. Menurut Saifuddin Azwa, MA penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis pada terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara – cara berfikir formal dan argumentatif.<sup>6</sup>

Teknik analisa data merupakan proses mengatur data kedalam sebuah satuan uraian yang bertujuan dapat dijelaskan data dan variable dalam penelitian secara sistematis. dengan menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, lisan dari orang-orang yang berkompeten dalam penelitian ini serta perilaku yang dapat diamati.

Dalam hal ini penelitian yang dilakukan adalah analisa deskriptif yang diperoleh dari pengklarifikasian data yang kemudian digambarkan melalui susunan kalimat untuk memperoleh kesimpulan, selanjutnya adalah menganalisa sesuai dengan gejala obyek yang diteliti kemudian menginterpretasikan data dan dasar teori yang ada serta. Data diperoleh melalui naskah tertulis, wawancara, catatan laporan, dokumen resmi, dokumen pribadi untuk keabsahan dalam penelitian.

---

<sup>6</sup> Saifuddin Azwa, MA. "Metode Penelitian" Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal 40